

## **LATAR BELAKANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG EVAKUASI MEDIS AUSTRALIATAHUN 2019**

**Akmalal Hamdhi**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
E-mail: hamdhiakmalal@gmail.com

**Drs.Muharjono**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: muharjono.msi@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Pemerintah Australia mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis. Undang-Undang Evakuasi Medis adalah Undang-Undang Australia yang memuat ketentuan akses evakuasi medis bagi pengungsi yang sakit kritis untuk dipindahkan dari rumah sakit Pulau Manus dan Pulau Nauru menuju rumah sakit di Australia. Namun, belum genap satu tahun berlaku, Undang- Undang tersebut dicabut dan segala akses evakuasi medis menuju Australia diberhentikan. Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur atau speech act theory dalam buku Security : A New Framework for Analysis karya Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap De Wilde untuk menemukan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dibalik latar belakang pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis Australia tahun 2019. Berdasarkan speech act theory, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis merupakan tindak tutur pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Pendeklarasian keamanan digunakan Pemerintah Australia sebagai klaim agar dapat mencabut ketentuan Undang-Undang Evakuasi Medis secara darurat.

Kata Kunci: Undang-Undang Evakuasi Medis, Pengungsi, Australia, Pencabutan, pengamanan.

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze why the Australian Government repeals the Medical Evacuation Act. The Medical Evacuation Act is an Australian law that contains access to medical evacuation for critically ill refugees to be transferred from Manus Island and Nauru Island hospitals to hospitals in Australia. However, the Act was repealed less than a year into force, and all access to medical evacuation to Australia was terminated. This study uses speech act theory in the book Security: A New Framework for Analysis by Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap De Wilde to find out who the actors involved are behind the repeal of the Australian Medical Evacuation Act 2019. Based on speech act theory, this study finds that the dissolution of the Medical Evacuation Act is a security speech act carried out by the Australian Government. The Australian Government uses the security declaration as a claim to be able to repeal provisions*

*of the Medical Evacuation Act on an emergency basis.*

*Keywords: Medical Evacuation Act, Refugee, Australia, Repeal, Securitization.*

## PENDAHULUAN

Australia adalah salah satu negara di dunia yang membuat kebijakan pusat penahanan lepas pantai sebagai tempat pemrosesan status pengungsi. Hal ini bahkan telah dimulai sejak tahun 2001, yang dikenal dengan nama kebijakan Solusi Pasifik. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang menjadikan pulau-pulau kecil seperti Pulau Manus dan Pulau Nauru sebagai tempat untuk menampung pencari suaka ataupun pengungsi. Kebijakan ini diberlakukan pada masa pemerintahan John Howard (Partai Liberal) pada tahun 2001. Howard membuat kebijakan yang disebut sebagai kebijakan Solusi Pasifik, yaitu pemindahan pencari suaka ke pusat detensi yang tersebar di negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik. Kebijakan Solusi Pasifik sempat diberhentikan pada tahun 2007 pada masa pemerintahan Kevin Rudd dari Partai Buruh, namun pada akhirnya diberlakukan kembali pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbot (Suwecawangsa, 2017).

Gambar 1.1 Peta Pulau Manus dan Pulau Nauru



Sumber: Refugee Action, 2021.

Gambar diatas menunjukkan jarak antara Australia dengan pusat penahanan lepas pantai miliknya, yakni Pulau Manus dan Pulau Nauru. Apabila jarak ditarik dari semenanjung Cape York sebagai titik paling utara di benua Australia, maka jarak yang harus ditempuh dari Australia untuk menuju Pulau Manus adalah sejauh 1110 km. Sementara itu, jarak yang harus ditempuh dari Australia untuk menuju Pulau Nauru yakni sejauh 2990 km.

Sebagai negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Australia memiliki kewajiban

untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap para pencari suaka yang datang ke negara Australia. Memberikan jaminan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab dasar bagi Australia. Para pencari suaka yang datang ke Australia untuk memintaperlindungan karena alasan penindasan yang ia terima di negara asalnya, mestinya dijamin perlindungannya dan dijauhkan dari segala bentuk penindasan. Namun pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Australia malah bertentangan dengan komitmen Australia dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Australia menuai kontroversi dengan melakukan pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Akibatnya pengungsi yang alami sakit kritis di pulau penahanan tidak memiliki akses evakuasi perawatan ke Australia. Proses evakuasi medis ke Australia tersebut diperlukan karena fasilitas layanan kesehatan dan perawatan yang tersedia di Pulau Manus dan Pulau Nauru berada jauh di bawah standar. Di samping itu, pemberlakuan Undang-Undang Evakuasi Medis tersebut diperlukan agar dapat memangkas waktu evakuasi para pengungsi yang alami sakit kritis. Dengan adanya Undang-Undang Evakuasi Medis, waktu pemindahan mulanya dari 2 hingga 5 tahun dipangkas menjadi maksimal 72 jam.

Medevac law atau Undang-Undang Evakuasi Medis adalah Undang-Undang yang menyediakan jalur bagi pengungsi yang sakit kritis dan orang yang mencari suaka di tahanan lepas pantai untuk dipindahkan ke Australia untuk perawatan medis yang mendesak. Pengungsi yang mengalami sakit kritis hanya membutuhkan waktu 72 jam, hingga akhirnya dapat disetujui untuk dipindahkan ke rumah sakit yang berada di Australia. Untuk menerima evakuasi medis ke Australia, dua dokter independen Australia harus merekomendasikan pemindahan sementara pengungsi yang sakit ke Australia dan setuju bahwa perawatan yang tepat tidak dapat diberikan saat orang tersebut berada dalam penahanan lepas pantai Pulau Manus dan Pulau Nauru. Dua dokter yang merawat masing-masing harus menilai pasien dan membuat rekomendasi untuk dipindahkan ke Australia jika mereka yakin bahwa perawatan yang sesuai tidak tersedia di Pulau Manus atau Pulau Nauru. Mereka dapat memberikan penilaian ini secara langsung atau dari jarak jauh. Jika Menteri Dalam Negeri menolak mutasi, Independent Health Advice Panel (IHAP) berkesempatan menilai kembali rekomendasi mutasi. Panel Independen terdiri dari sembilan dokter termasuk Kepala Petugas Medis Pemerintah, Kepala Petugas Medis Departemen Dalam

Negeri, Ahli Bedah Jenderal Pasukan Perbatasan Australia bersama dengan perwakilan dari Australia Medical Association (AMA) (ASRC, 2019).

Resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 1 Maret 2019, Undang-Undang tersebut dicabut setelah 10 bulan berlaku yakni pada 4 Desember 2019 melalui agenda diskusi yang dilaksanakan di tingkat Majelis rendah (DPR) dan Majelis Tinggi (Senat). Tujuan dari pencabutan Undang-Undang evakuasi medis adalah untuk mengamandemen Undang-Undang Migrasi 1958, yakni menghapus ketentuan yang disisipkan oleh Amandemen Perundang-Undangan Dalam Negeri (Tindakan lain-lain) Undang-Undang 2019 mengenai ketentuan transfer medis. Bagian ke-6 Undang-Undang Evakuasi Medis tersebut dicabut karena menciptakan kerangka kerja untuk pemindahan orang-orang sementara (dan anggota keluarga mereka, dan orang lain yang direkomendasikan untuk menemani orang sementara) dari pemrosesan regional negara ke Australia untuk tujuan medis atau psikiatri penilaian atau pengobatan; dan menyediakan penghapusan dari Australia, atau kembali ke negara pemrosesan regional, dari orang sementara yang dibawa ke Australia di bawah ketentuan transfer medis, setelah tujuan sementara untuk yang mereka bawa ke Australia selesai (Parliamentary Joint Committee on Human Rights, 2019, Hal. 83). Berikut merupakan tabel penjelasan terkait proses pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis Australia tahun 2019:

Tabel 1 Proses Pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis

<b>House of Representatives</b>	
Introduced and read a first time	04 Jul 2019
Second reading moved	04 Jul 2019
Second reading debate	23 Jul 2019
Second reading debate	24 Jul 2019
Second reading agreed to	24 Jul 2019
Third reading moved	25 Jul 2019
Third reading debated	25 Jul 2019
Third reading agreed to	25 Jul 2019
<b>Senate</b>	
Introduced and read a first time	29 Jul 2019
Second reading moved	29 Jul 2019
Second reading debate	02 Dec 2019
Second reading debate	03 Dec 2019
Second reading debate	04 Dec 2019
Second reading agreed to	04 Dec 2019
Third reading agreed to	04 Dec 2019
Finally passed both Houses	04 Dec 2019

Assent

Act no: 110

Year: 2019

04 Dec 2019

Sumber: Parliament of Australia, 2021.

Tabel di atas merupakan rangkaian proses perjalanan agenda pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis yang telah melalui proses persidangan dari tingkat DPR ke tingkat Senat, hingga akhirnya disetujui oleh Gubernur Jenderal untuk disahkan menjadi suatu Undang-Undang. Selama perjalanan sidang pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis tersebut, perdebatan cukup hebat terjadi di dalam Parlemen Australia antara pihak yang mendukung pencabutan dan pihak yang menentang pencabutan.

Tim kepemimpinan Partai Buruh yakni ada Kristina Keneally, Penny Wong, Anthony Albanese and Richard Marles dengan tegas menolak pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Tim kepemimpinan baru Partai Buruh tersebut, telah berkomitmen akan tetap teguh memperthankan Undang-Undang Evakuasi Medis yang kontroversial, yang memungkinkan pengungsi yang sakit untuk diberikan akses evakuasi medis(Martin, 2019).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton bersama dengan koalisi menyetujui pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Peter Dutton berpendapat bahwa Undang-Undang Evakuasi Medis harus dicabut karena dapat menjadi jalur bagi para pembunuh, pemerkosa dan pedofil masuk ke wilayah Australia. Pemandahan pengungsi di bawah Undang-Undang Evakuasi Medis tersebut, dikhawatirkan akan menjadi pergerakan yang masif dan tidak dapat dibendung (Davidson, 2019). Berdasarkan temuan atas permasalahan tersebut, dapat dicermati bahwa ada keterkaitan antara tindakan pengamanan atau sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan Teori Sekuritisasi Migrasi menurut Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde di dalam buku "Security: A New Framework for Analysis". Barry Buzan dan kawan-kawan (1998, Hal. 23) menjelaskan bahwa sekuritisasi adalah sebuah bentuk ekstrim dari upaya-upaya politik. Sekuritisasi adalah langkah politik melampaui aturan yang ditetapkan dalam membingkai suatu isu, yakni apakah isu tersebut termasuk ke dalam ranah politik atau bahkan melampauinya.

Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap De Wilde (1998, Hal. 25) menjelaskan bahwa setiap isu publik dapat dikategorikan ke dalam tiga jangkauan yang antara lain sebagai berikut:

1. Non Politicized, artinya pemerintah tidak menangani permasalahan ini karena tidak

termasuk isu yang menyangkut kepentingan dan perdebatan dalam ranah publik.

2. Politicized, artinya isu tersebut sudah masuk ke ranah pemerintah sehingga membutuhkan keputusan pemerintah, dalam hal alokasi sumber daya ataupun kebijakan lainnya.
3. To Politicized, artinya isu/masalah disajikan sebagai ancaman eksistensial, sehingga memerlukan tindakan darurat dan tindakan pembenaran di luar batas normal prosedur politik.

Dalam buku *On Security*, Ole Waever (1993) menyebutkan bahwa "keamanan" sebagai sebuah "speech act". Menurut Waever, argumen dasar dari pendekatan sekuritisasi merupakan sebuah speech act atau tindak tutur, dimana adanya tindakan aktor dalam mengartikulasikan keamanan dengan tujuan untuk mengambil langkah-langkah apapun yang diperlukannya. Dengan mengucapkan "keamanan," seorang pejabat negara dapat memindahkan perkembangan tertentu ke area tertentu, dan dengan demikian mengklaim hak khusus untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk memblokirnya. Pelabelan keamanan yang dilakukan tersebut biasanya digunakan oleh pejabat negara untuk memungkinkan pengambilan tindakan politik darurat. Dengan demikian, isu yang awalnya bisa ditindaklanjuti dengan politik normal saja menjadi harus ditindaklanjuti dengan politik darurat yang memungkinkan aksi tanpa aturan politik resmi.

Lebih lanjut, ketiga penulis buku "Security: A New Framework for Analysis" tersebut menjabarkan mengenai cara dalam menganalisa keamanan melalui pendekatan speech act. Pengartikulasian keamanan melalui pendekatan speech act membutuhkan tiga jenis unit yang berkaitan dengan upaya analisa proses sekuritisasi (Buzan, Ole W. & Jaap D.W, 1998, Hal. 36). Unit analisis keamanan dalam pendekatan speech act, antara lain:

1. Referent objects (Objek terdampak) : hal-hal yang terlihat terancam secara eksistensial, maka memiliki klaim sah untuk dipertahankan.
2. Securitizing actor (Aktor pengamanan) : aktor yang melakukan speech act, yang mengamankan isu dengan mendeklarasikan sesuatu sebagai tindakan sekuritisasi.
3. Functional actor (Aktor fungsional) : aktor yang mempengaruhi dinamika suatu sektor, tanpa harus bertindak sebagai referent objects atau securitizing actor. Aktor ini adalah aktor yang secara signifikan mempengaruhi dari luar munculnya keputusan-keputusan sebagai tindakan pengamanan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana. Analisis wacana adalah metode dalam menganalisa pidato yang terhubung ataupun tulisan, untuk melanjutkan linguistik deskriptif di luar batas sederhana kalimat secara sekaligus (Harris, 1952). Analisis wacana juga dapat dilihat sebagai "bahasa yang digunakan". Maksud dari "bahasa yang digunakan" yakni kumpulan norma, preferensi, dan harapan yang menghubungkan bahasa dengan konteks. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa analisis wacana merupakan metode atau cara dalam mempelajari hubungan antara bahasa (tertulis, lisan – percakapan, bentuk pembicaraan yang dilembagakan) dan konteks yang digunakan. Yang terpenting adalah teksnya terasa koheren (Kamalu & Ayo O., 2015).

Adapun proses pembentukan wacana dilakukan melalui proses yang disebut proses konstruksi realitas. Hasil dari proses ini adalah bentuk wacana (naskah) berupa Text (wacana dalam wujud tulisan/grafis), Talks (wacana dalam wujud ucapan), Act (wacana dalam wujud tindakan), dan Artifact (wacana dalam wujud jejak) (Hamad, 2007).

Pendekatan analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian wacana dengan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari suatu konstruksi. Penerapan analisis metode-metode paradigmatis adalah dengan cara menemukan bukti-bukti dalam naskah atau menunjukkan bagian-bagian dari naskah sebagai temuan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk itu, peneliti mencari tanda-tanda (signs) yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Hamad, 2007).

Melalui metode analisis wacana dengan menggunakan paradigma konstruktivis, peneliti berusaha untuk menganalisis apa yang ada di balik kata dan kalimat yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait dalam pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis Australia. Adapun teori wacana yang dipakai untuk menganalisis wacana (naskah) adalah menggunakan teori framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk menemukan strategi pemilihan fakta yang akan dimasukkan/dikeluarkan dari suatu wacana yang populer. Dalam analisis framing, ada dua esensi utama yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan bagian mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan (Eriyanto, 2002). Dengan

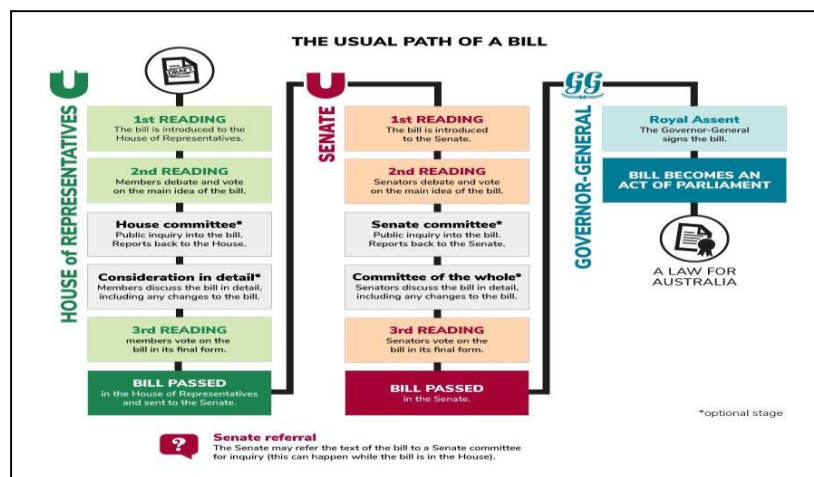
demikian, dalam penelitian ini konsentrasi analisisnya adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dibentuk atau dikonstruksi dan dengan cara apa realitas tersebut dikonstruksi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research (Studi Kepustakaan). Kegiatan penelaahan data tersebut didapatkan dari buku teks, jurnal ilmiah, e-jurnal, dokumen/keputusan-keputusan pemerintah, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas tentang Undang-Undang Evakuasi Medis Australia. Sementara itu, sumber data yang digunakan adalah menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data-data penunjang seperti data jumlah imigran, pengungsi, ataupun pencari suaka yang masuk ke wilayah Australia, lalu data mengenai peta jalur masuk para pencari suaka, data jumlah pengungsi yang saat ini berada di Pulau Manus dan Pulau Nauru, serta data penunjang lainnya yang dapat membantu peneliti memperoleh validitas data.

## PEMBAHASAN

Pada dasarnya, mencabut suatu Undang-Undang di Australia memerlukan proses yang sama dengan membuat Undang-Undang baru. Sebuah RUU pencabutan — Undang-Undang yang diusulkan — harus diperdebatkan dan disetujui oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum ditandatangani menjadi Undang-Undang oleh Gubernur Jenderal. Selain itu pencabutan RUU juga akan diumumkan ke publik Australia, seperti halnya pembuatan Undang-Undang (PEO, 2021).

Gambar 1 Prosedur Pembuatan UU di Parlemen Australia



Sumber: Parliament Education Office, 2021.



Gambar 1 di atas, merupakan gambar prosedur pembuatan ataupun pencabutan suatu Undang-Undang di Parlemen Australia. Berdasarkan tersebut dapat dijelaskan bahwa sebuah Undang-Undang dapat dicabut, apabila sudah melalui tahap first reading, tahap second reading, dan tahap third reading dari tingkat DPR hingga tingkat Senat. Selanjutnya, jika DPR dan Senat sudah memberikan persetujuan, maka suatu Undang-Undang yang tengah berlaku dapat sewaktu-waktu dicabut. Selain itu, DPR dan Senat juga dapat meminta bantuan dari komite-komite yang dapat membantu memberikan saran dalam pengambilan suatu keputusan.

Agenda pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis pertama kali diundangkan yakni pada 4 Juli 2019, untuk melalui tahap first reading. Pada tahap first reading ini dapat dikatakan hanyalah merupakan tahap yang bersifat formalitas dan hanya berlangsung singkat. Setelah Juru tulis HoR (Clerk of the House) membacakan judul RUU yang akan dibahas, maka akan diumumkan oleh Menteri yang bersangkutan bahwa persidangan ditunda (adjourn) dan RUU tersebut akan dibahas pada tahap second reading. Oleh karena itu, tidak ada perdebatan yang terjadi pada tahap ini (Hamid, 1999)

Selanjutnya, proses pencabutan Undang-Undang memasuki tahap second reading dan tahap third reading. Pada tahap-tahap inilah Undang-Undang Evakuasi Medis didiskusikan terkait bagian yang menjadi tuntutan hingga akhirnya dilakukan pengesahan. Diskusi tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 23 – 25 Juli 2019. Selama tiga hari diskusi, sayangnya diskusi tersebut masih belum menemukan kata sepakat, setelah suara yang diperoleh di dalam voting ternyata hasilnya berimbang.

Dari 76 Senator yang memberikan suara di dalam voting, dihasilkan bahwa terdapat 38 Senator yang menyetujui pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis, dan terdapat 37 Senator yang menolak pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis, serta menyisakan 1 Senator yang memilih untuk abstain dalam voting. Pihak yang menyetujui pencabutan berjumlah 38 Senator, terdiri dari Koalisi (35), One Nation (2), dan Cory Bernardi (1). Sementara itu, pihak yang menolak pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis berjumlah 37 Senator, terdiri dari Partai Buruh (26), Partai Hijau (9), Centre alliance (2), dan satu Senator yang memilih abstain yakni Senator Tasmania, Jacquei Lambie (1). Oleh karena dibutuhkan setidaknya 39 suara untuk mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis, dan dibutuhkan setidaknya 38 suara untuk menentang pencabutan, maka satu suara dari Jacquei Lambie

yang memilih abstain, menjadi penentu dari hasil keputusan pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis saat dilakukannya sidang lanjutan pada tingkat Senat (Worthington, 2019).

Sidang pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis pada tingkat Senat dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2019, untuk melalui tahap second reading dan third reading. Undang-Undang Evakuasi Medis tersebut sebelumnya telah melalui tahap first reading di tingkat Senat, pada tanggal 29 Juli 2019. Pada sidang pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis di tingkat Senat, dihasilkan bahwa Undang-Undang Evakuasi Medis disetujui untuk dicabut. Dari 76 Senator, terdapat 39 Senator yang menyetujui pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis, sementara itu terdapat 37 Senator yang menolak pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Undang-Undang Evakuasi Medis tersebut kemudian secara resmi dicabut yakni pada 4 Desember 2019, setelah Jacqui Lambie bergabung dengan aliansi One Nation dan berpihak pada kubu pemerintah.

Berdasarkan tiga unit analisis keamanan dalam pendekatan speech actt antara lain objek terdampak, aktor pengamanan dan aktor fungsional selanjutnya akan dibahas secara tuntas tentang bukti-bukti, pernyataan, hingga tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam kasus pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Selain itu, bahasan ini akan menjadi pembuktian bagi aktor-aktor yang telah dikaitkan dalam munculnya keputusan pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Melalui bantuan dari pendekatan speech act dalam buku *Security: A New Framework for Analysis*, akan dijabarkan terkait pembahasan yang mencerminkan tiga kunci sekuritisasi, yakni referent objects, securitizing actor, dan functional actor.

### **Ancaman Keamanan Terhadap Masyarakat Australia**

Sebagai langkah dalam mendefinisikan sistemik sebuah objek terdampak, harus diingat mengenaikriteria dasar suatu keamanan. Isu yang dihadirkan harus menjadi ancaman yang bersifat dramatis, digambarkan sebagai ancaman kehancuran, kehancuran beberapa prinsip atau beberapa efek lainnya yang tidak dapat diperbaiki, dimana seseorang kemudian dapat melegitimasi langkah-langkah ekstrem (Buzan, Ole W. & Jaap D.W, 1998). Sama halnya dengan apa yang dihadirkan dalam kasus pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis, isu yang dihadirkan adalah ancaman terhadap masyarakat Australia. Pengkonstruksian kata-kata "keamanan" yang digalakkan oleh elit politik Australia telah

mendorong banyak pihak untuk percaya bahwa ancaman keamanan memang benar adanya, dibandingkan jika terus mempertahankan Undang-Undang Evakuasi Medis. Ancaman keamanan dari hadirnya Undang-Undang Evakuasi Medis tersebut dikaitkan dengan berbagai macam kemungkinan yang mengerikan, seperti datangnya penjahat, penyelundup dan pedofil masuk ke wilayah Australia.

Menteri Dalam Negeri, Peter Dutton mengklaim bahwa Undang-Undang Evakuasi Medis merupakan sebuah ancaman bagi keamanan masyarakat Australia. Dutton mengkhawatirkan lemahnya aturan atau prosedur pemindahan pengungsi dalam Undang-Undang Evakuasi Medis. Menurut Dutton, dokter perlu berbicara dengan pasien baik melalui telekonferensi ataupun secara langsung, dan tidak dapat menilai pemberian transfer medis hanya melalui file riwayat medis seorang pengungsi. Dimana hal tersebut telah memudahkan dokter untuk membuat rekomendasi transfer, sehingga menciptakan situasi dimana Australia telah dipaksa untuk menerima orang-orang, bahkan orang dengan karakter yang buruk (Remeikis, 2019). Salah satu contoh pemberian akses masuk bagi orang dengan karakter buruk ke Australia adalah dua orang Rwanda yang dituduh melakukan pembunuhan, yang diterima sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pengungsi dengan Amerika Serikat. Dari kejadian tersebut, membuat Dutton tidak ingin lagi memberikan akses masuk secara mudah bagi siapapun untuk masuk ke wilayah Australia (Davidson dan Eleanor A.R., 2019).

Klaim yang dibuat Dutton terhadap Undang-Undang Evakuasi Medis sebagai sebuah ancaman lantas mendapatkan banyak kritik dari kubu oposisi. Juru Bicara Urusan Dalam Negeri Partai Buruh, Kristian Kenneally yang menyebutkan bahwa peringatan Dutton tentang Undang-Undang Evakuasi Medis akan memicu kedatangan banyak kapal hanyalah masalah yang dibesar-besarkan, karena tidak ada yang berubah dan prosedur yang dibuat dalam pemindahan pengungsi sudah cukup jelas. Pelamar yang ingin meminta izin akses evakuasi medis masih akan dinilai oleh dokter, baik di Nauru, Manus ataupun Australia. Selain itu, siapa pun yang dibawa ke Australia untuk perawatan medis tidak akan dilepaskan ke masyarakat. Mereka tetap dalam tahanan dan dikawal ke janji medis, tetap di bawah penjagaan saat menerima perawatan.

Kendati demikian, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan terhadap publik Australia, justru ditemukan bahwa sebagian besar warga Australia mendukung adanya proses evakuasi medis. Jajak pendapat terkait pencabutan Undang-Undang evakuasi medis

tersebut, menunjukkan 62% masyarakat mendukung keberadaan Undang-Undang Evakuasi Medis, sementara hanya ada 22% masyarakat yang menginginkan Undang-undang Evakuasi Medis untuk dicabut. Selain itu, sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 5.000 dokter juga telah dikirimkan ke parlemen Australia, yang isinya meminta para Senator untuk mempertahankan Undang-Undang Evakuasi Medis (Walton, 2019).

Survei terbaru Guardian Essential menunjukkan dukungan pemilih untuk rezim Undang-Undang Evakuasi Medis saat ini hampir sama seperti pada Februari 2019, meskipun pemerintah Morrison berdebat selama berbulan-bulan bahwa Undang-Undang Evakuasi Medis menciptakan risiko keamanan nasional. Pada bulan Februari, hanya 16% dari sampel yang berpandangan bahwa sistem dalam Undang-Undang Evakuasi Medis tidak cukup berbelas kasih, dan sekarang mencapai 25%. Lebih lanjut 37% dari sampel berpendapat bahwa prosedur Undang-Undang Evakuasi Medis telah mencapai keseimbangan antara perbatasan yang kuat dan perlakuan manusiawi bagi orang-orang di Pulau Nauru dan Pulau Manus. Sementara lebih dari 60% sampel tampaknya mendukung status quo atau sesuatu yang lebih kuat, hanya di bawah seperempat sampel (22%) yang percaya bahwa rezim Undang-Undang Evakuasi Medis dapat melemahkan keamanan sosial Australia dan 17% memilih abstain. Mayoritas pemilih Australia mendukung rezim Undang-Undang Evakuasi Medis dalam keadaan saat ini dan percaya bahwa Australia harus lebih berbelas kasih terhadap pengungsi.

Pemerintah menuduh pengungsi yang dievakuasi dibawah akses Undang-Undang Evakuasi Medis akan menjadi penyelundup dan berbuat kejahatan di wilayah Australia. Namun, tuduhan Pemerintah Australia terhadap para pengungsi tersebut justru dianggap merupakan tuduhan yang tidak memiliki dasar. Selama kurun waktu tahun 2019-2020, dimana Undang-Undang Evakuasi Medis diberlakukan, justru laporan mengenai tindak pelanggaran di Australia malah menurun. Australian Bureau of Statistics (ABS) melaporkan bahwa ada 374.645 pelanggar yang diproses oleh Polisi di seluruh Australia pada tahun 2019-2020, dimana pelanggaran tersebut malah mengalami penurunan 5% (turun 19.993 pelanggar) sejak 2018-2019. Jumlah pelanggar pun tercatat adalah jumlah yang terendah sejak rangkaian waktu dimulai pada tahun 2008-09. Jenis pelanggaran yang ditemui adalah meliputi penggunaan obat-obatan, pelanggaran yang menyebabkan tindakan cedera, perampokan, pelanggaran penghindaran tarif dan pelanggaran ketertiban umum.

Menurunnya pelanggaran selama pemberlakuan Undang-Undang Evakuasi Medis menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Undang-Undang Evakuasi Medis yang dianggap sebagai jalur masuk para penyelundup terbukti tidak valid.

Selain itu, pengungsi yang dievakuasi ke rumah Sakit Australia pun aksesnya sangat dibatasi. Ketika sampai ke rumah sakit Australia untuk mendapatkan evakuasi medis, pengungsi ditempatkan di rumah sakit-rumah sakit yang khusus menangani pengungsi, atau disebut dengan istilah *Alternative Places of Detention (APOD's)*. Penempatan pengungsi di tempat penahanan alternatif tersebut merupakan 50 rekomendasi yang diberikan langsung oleh Departemen Dalam Negeri, dan tempatnya terletak di Mantra Hotel di Preston, kemudian Park Hotel di Carlton, Melbourne dan Kangaroo Point Central Hotel di Brisbane (Atfield, 2021). Jadi, kecil kemungkinan apabila pengungsi yang dievakuasi ke Australia dapat melakukan kejahatan, sementara pengungsi terkurung di tempat penahanan alternatif yang telah disediakan. Lagipula, sebelum proses evakuasi medis disetujui, Menteri Dalam Negeri memiliki hak veto untuk menolak atau menyetujui proses evakuasi medis, jika ditemukan kecurigaan bahwa pengungsi yang dibawa akan menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Australia. Jadi, apabila memang pengungsi dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Australia, semestinya hal tersebut sudah disadari dan dicegah terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri, sebelum diberikannya izin evakuasi medis.

Namun upaya yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton justru disambut baik di parlemen Australia. Beberapa Senator parlemen pun menunjukkan dukungannya dalam wacana pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Senator Independen Cory Bernardi termasuk di antara mereka yang mendukung desakan pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis. Dia mengatakan kepada wartawan Oposisi medis, bahwa posisinya sama sekali tidak berubah dalam mendukung proses pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Meningkatkan kekhawatiran pemerintah Morrison atas Undang-Undang tersebut menjadi celah yang dapat mengancam keamanan perbatasan.

"Terus terang Undang-Undang Evakuasi Medis telah disalahgunakan dan disalahartikan, seperti yang diidentifikasi sebagai orang-orang rentan pada saat itu. Jadi pada akhirnya kita harus menjaga orang-orang Australia, kita harus menjaga cara hidup kita, kita harus memastikan bahwa kita melindungi perbatasan kita dari ancaman asing dan domestik", tutur Cory Bernardi. (Senate Hansard, 2019)

Dukungan lainnya datang dari Menteri Keuangan Australia, Senator Mathias Cormann. Mathias Cormann menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memuaskan mayoritas Senator dengan mengambil keputusan untuk mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis. Menurutnya, pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis merupakan upaya dalam memperbaiki kekacauan yang diwariskan oleh partai buruh.

“Izinkan saya memberi tahu anda, bahwa pemerintah berharap dapat memuaskan mayoritas senator di tempat ini bahwa Undang-Undang Evakuasi Medis yang lemah dari Partai Buruh perlu dicabut, bahwa itu perlu dan bahwa kami melakukan semua hal yang tepat untuk menangani warisan beban kasus tanpa mengorbankan keamanan perbatasan dan pengaturan keamanan nasional kami”, ujar Mathias Cormann dalam sidang pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis di tingkat Senat pada tahap second reading. (Senate Hansard, 2019)

### **Tindakan Pemerintah dalam rangka Pengamanan Masyarakat**

Dalam kasus sebuah negara, pemerintah biasanya akan menjadi sekuritisasi aktor. Sebuah pemerintahan akan sering tergoda untuk menggunakan argumen keamanan (dalam kaitannya dengan negara) ketika kekhawatirannya adalah bahwa pemerintah itu sendiri terancam (Buzan, Ole W. & Jaap D.W, 1998). Ancaman eksistensial terhadap suatu negara adalah yang pada akhirnya menyangkut kedaulatan, karena kedaulatanlah yang mendefinisikan negara sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, ancaman terhadap kelangsungan hidup negara atau masyarakat merupakan ancaman terhadap kedaulatan. Bahkan pelanggaran kecil terhadap kedaulatan merupakan ancaman, karena kedaulatan adalah prinsip yang menuntut hak tertinggi pemerintahan itu sendiri, jadi hal itu dapat terancam punah jika menjadi parsial dalam arti apa pun. Apa pun yang dapat digambarkan sebagai pelanggaran kedaulatan (intervensi) dapat disajikan sebagai masalah keamanan.

Berdasarkan kasus Undang-Undang Evakuasi Medis, aktor pengamanannya adalah Scott Morrison dan Peter Dutton. Scott Morrison dan Peter Dutton merupakan aktor yang melakukan sekuritisasi dengan mendorong agenda pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Kepada publik, kedua pimpinan pemerintahan tersebut membuat narasi terkait ancaman mengerikan yang dapat ditimbulkan dari Undang-Undang Evakuasi Medis. Ketika Undang-Undang Evakuasi Medis sah berlaku sebagai sebuah Undang-Undang, Scott Morrison memberikan pernyataan kepada publik bahwa dirinya akan terus berusaha menentang pemberlakuan Undang-Undang sejenis tersebut. Scott Morrison menyatakan

bahwa dirinya berjanji akan mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis apabila dirinya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia pada pemilihan umum Australia, 18 Mei 2019, sekaligus memungkinkannya untuk menutup Pulau Christmas dengan penghematan sekitar 1,2 miliar Dolar (Wroe & David C., 2019).

Mengutip dari news.com.au, diketahui bahwa Perdana Menteri Scott Morrison telah merekam video rahasia yang ditargetkan pada penyelundup manusia, memperingatkan bahwa mereka yang bersedia melakukan perjalanan berbahaya "tidak akan berhasil". Video berdurasi dua menit, yang direkam di Canberra pada Jumat (15/2/2019), diterjemahkan ke dalam 15 bahasa dan ditayangkan di negara-negara yang penuh dengan pencari suaka termasuk Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan Afghanistan, The Daily Telegraph mengungkapkan. "Tidak seorang pun yang mencoba perjalanan kapal ilegal ke Australia akan diizinkan untuk menetap di sini," Mr. Morrison memperingatkan dalam video (Fernando & Charis C., 2019).

"Otoritas perlindungan perbatasan Australia akan mencegat setiap kapal penyelundup manusia yang mendekati Australia, dan mereka akan mengembalikan orang-orang yang ada di dalamnya ke negara keberangkatan atau negara asal mereka. Jangan salah, jika Anda mencoba datang ke Australia secara ilegal dengan perahu, Anda tidak akan berhasil. Jadi jangan buang uang Anda atau pertaruhkan hidup Anda, atau hidup orang lain, untuk apa-apa", ungkap Scott Morrison.

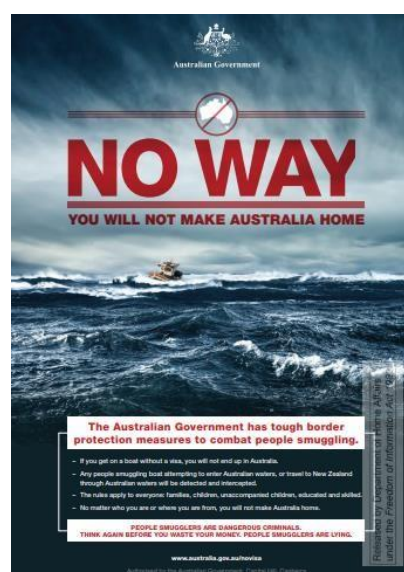
Pesan video Scott Morrison tersebut dibuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat mengesahkan RUU Evakuasi Medis yang memungkinkan evakuasi medis pencari suaka dari Pulau Manus dan Nauru. Hal ini sekaligus menandai pertama kalinya Perdana Menteri Australia mengirim pesan video langsung kepada penyelundup manusia, meskipun itu mencerminkan pesan serupa yang direkam oleh Morrison pada tahun 2014 ketika dia menjadi Menteri Imigrasi (Fernando dan Charis C., 2019). Melalui pesan video singkat tersebut, Scott Morrison ingin memperlihatkan ketegasannya terhadap pencari suaka yang masuk dibawah Undang-Undang Evakuasi Medis. Sebagai seorang mantan Menteri Imigrasi, dirinya tidak ingin melihat keamanan Australia diperlemah oleh kedatangan penyelundup yang dibawa masuk dibawah akses Undang-Undang Evakuasi Medis.

Pemberian akses evakuasi medis dikhawatirkan akan mengulang kembali kedatangan pengungsi internasional yang berdatangan ke Australia dengan menggunakan perahu atau dikenal dengan istilah Boat People. Logikanya, dengan pemberian akses evakuasi medis

dikhawatirkan dapat mendorong peningkatan angka pencari suaka yang mencoba mencapai Australia. Dimana hal tersebut dapat membahayakan kondisi pencari suaka yang berada di tengah lautan. Selain itu, pemberian akses evakuasi medis kepada pengungsi bisa saja menjadi jalur masuk baru bagi penyelundupan menuju Australia. Dimana membuat Pemerintah Australia sulit untuk menggagalkan aksi-aksi kejahatan transaksional secara diam-diam seperti itu.

Berbagai kebijakan bahkan pernah diterapkan untuk menghalau masuknya para "manusia perahu" tersebut, seperti kebijakan Solusi Pasifik dan Operation Sovereign Borders (OSB). Kebijakan Solusi Pasifik yang diterapkan pada era John Howard melihat semua pencari suaka yang tiba dengan perahu untuk dicegat di laut dan dikirim langsung ke kamp-kamp lepas pantai yang didirikan di Pulau Nauru dan Pulau Manus. Pemerintah Australia mengklaim kebijakan Solusi Pasifik telah menghentikan kapal-kapal dan dengan demikian kasus kematian di laut. Diasumsikan setiap kedatangan pengungsi di masa depan selanjutnya akan ditangani dengan proses penyaringan yang ditingkatkan dan pengembalian kapal. Sementara itu, Operation Sovereign Borders (OSB) melihat peningkatan yang berbeda dalam perlakuan terhadap pencari suaka sebagai masalah keamanan perbatasan, dengan penggunaan sumber daya militer dan bea cukai, penunjukan perwira militer bintang tiga untuk memimpin operasi, dan budaya kerahasiaan yang meningkat. (Davidson, 2019)

Gambar 3.1 Poster Kampanye Operation Sovereign Borders



Sumber : homeaffairs.gov.au. 2021. "Operation Sovereign Borders". <https://osb.homeaffairs.gov.au/>. Diunduh tanggal 12 Agustus 2021.



Gambar di atas merupakan poster kampanye yang dibuat oleh Pemerintah Australia guna mencegah kedatangan pengungsi internasional dengan menggunakan kapal. Poster kampanye tersebut bahkan telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dari negara-negara asal pengungsi internasional seperti Rohingya, Sinhala, Tamil, dan Urdu. Melalui poster kampanye tersebut Pemerintah Australia ingin menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pengungsi internasional untuk menjadikan Australia sebagai rumah. Salah satu pengusiran kapal yang dilakukan dibawah kebijakan Operation Sovereign Borders (OSB) adalah peristiwa pengembalian kembali 37 kapal pencari suaka asal Sri Lanka pada bulan November 2014. (Pedley, 2019)

Aktor pengamanan yang kedua adalah Peter Dutton. Selaku Menteri Dalam Negeri, Dutton menggunakan kekuatannya untuk dapatkan dukungan publik mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis. Dalam sebuah pernyataan yang diajukan di parlemen, Dutton mengatakan bahwa dia menolak pindahan pada 11 Oktober berdasarkan pasal 198G(2) dari Undang-Undang Migrasi, karena dia cukup yakin individu tersebut "akan mengekspos komunitas Australia pada risiko serius melakukan tindakan kriminal". Peter Dutton telah menggunakan kekuasaannya di bawah Undang-Undang Evakuasi Medis untuk memblokir pindahan pengungsi dengan alasan keamanan dan mengungkapkan klaimnya yang sudah berjalan lama bahwa Undang-Undang tersebut membuat pemerintah tidak berdaya (Davidson, 2019).

Morrison dan Dutton, bahkan telah berulang kali mengklaim Undang-Undang Evakuasi Medis hanya akan membawa pembunuh, pemerkosa, dan pedofil ke Australia, dan pemerintah dikhawatirkan tidak dapat menghentikan hal itu terjadi (Davidson, 2019). Pendeklarasian keamanan yang dilakukan oleh Morrison dan Dutton tersebut dilakukan dengan cara menggelorakan kata-kata perlindungan "keamanan nasional" dan memposisikan Undang-Undang Evakuasi Medis sebagai ancaman eksistensialnya. Akibatnya, undang-undang tersebut digambarkan sebagai pelanggaran kedaulatan yang disajikan sebagai masalah keamanan. Perlindungan terhadap ancaman kedaulatan tersebutlah yang menjadi dasar keluarnya putusanpencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis Australia.

Melalui konferensi pers yang dilakukan setelah kemenangan koalisi dalam voting pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis di tingkat Senat, Scott Morrison dan Peter

Dutton menyampaikan bahwa pemerintah telah memenuhi janji mereka untuk mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis yang membiarkan para penyelundup masuk ke wilayah Australia (7News.Australia, 2019).

“Setahun yang lalu kami mengalami kekalahan di parlemen, tapi kami tetap berdiri teguh. Kami tetap berdiri teguh dan bersiap menuju pemilihan umum, kemudian kami berkata dukunglah koalisi, maka kami berjanji akan mencabut Undang-Undang tersebut’. Dan kemarin, kami memenuhi janji tersebut untuk orang-orang Australia, guna memproteksi keamanan masyarakat Australia. Selain itu, saya senang dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Scott Morrison untuk mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis”, ungkap Peter Dutton dalam konferensi pers usai kemenangan pemerintah dalam mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis, Rabu (4/12/2019).

### **Dukungan terhadap Pemerintah dalam rangka Pengamanan Masyarakat**

Dalam kasus pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis aktor fungsionalnya adalah Media, Pauline Hanson dan Jacquei Lambie. Pemberitaan media tentang pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis telah meningkatkan sentimen terhadap keberadaan pengungsi. Media Australia telah memandu opini publik untuk dapat mempercayai keputusan pemerintah bahwa Undang-Undang Evakuasi Medis merupakan sebuah ancaman. Media di Australia sebagian besar dikuasai oleh news corp milik miliader Australia, Rupert Murdoch. Publikasi news corp mencapai 60% dari penjualan surat kabar Australia. Selain koran nasional The Australian dan tabloid di sebagian besar kota, news corp memiliki surat kabar utama di Northern Territory dan Tasmania. Ia juga memiliki salah satu situs web berita terbesar di Australia, news.com.au dan saluran televisi 24 jam, Sky News. Saluran youtube Sky News memiliki lebih dari satu juta pelanggan, kedua setelah penyiar nasional ABC News. Meskipun pengaruh mereka menurun di atas rata-rata orang Australia, surat kabar news corp tetap sangat berpengaruh pada politisi.

Perusahaan ini memiliki hubungan dekat dengan koalisi Liberal-Nasional, yang telah berada di pemerintahan di tingkat federal sejak 2013. "News corp tidak memiliki pengaruh dengan publik tetapi pengaruh akut dengan politisi," ungkap mantan eksekutif news corp, Kim Williams (Walton, 2020). Dengan pengaruh yang cukup besar, media Australia telah menggiring opini publik untuk dapat mempercayai Undang-Undang Evakuasi Medis sebagai sebuah ancaman keamanan. Pada 1 Desember 2019, saluran youtube Sky News

Australia memberitakan terkait ancaman dari penerapan Undang-Undang Evakuasi Medis, dengan judul berita yang bertajuk 'The boats could start up again' if controversial medevac laws are not repealed. Dalam acara tersebut, kontributor Sky News Warren Mundine mengatakan Undang-Undang Evakuasi Medis yang kontroversial "tidak benar-benar tentang kesehatan orang-orang di Kepulauan Manus dan Nauru" tetapi sebaliknya, "hanya cara pintu belakang untuk membawa orang masuk ke Australia". Mundine mengatakan dia berharap Jacqui Lambie "benar-benar akan mulai melihat dengan akal sehat sehubungan dengan seluruh proses ini." Jika terus mempertahankan Undang-Undang yang memberikan akses pintu belakang masuk ke Australia ini, yang dilakukan hanyalah mengundang kembali perahu agar masuk ke Australia," kata Mundine kepada pembawa acara Sky News, Gemma Tognini (Skynews.com.au., 2019).

Gambar 4.1 Berita yang dipublikasikan oleh news.com.au



Sumber: Skynews.com.au., 2019.

Dalam pemberitaan yang lain, Sky News Australia melansir bahwa Undang-Undang Evakuasi Medis Australia telah membiarkan masuk terdakwa pelaku pelecehan seksual anak datang ke Australia. Berita yang bertajuk "Accused child sex abuser to come to Australia under medevac laws" menginformasikan bahwa seorang pencari suaka di Nauru yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di pulau itu, dilaporkan akan dibawa ke Australia di bawah Undang-Undang transfer medis yang kontroversial. Pria tersebut berasal dari Burma dan merupakan salah satu dari 120 orang yang dipindahkan dibawah aplikasi Undang-Undang Evakuasi Medis dalam sebulan terakhir. Peter Dutton menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menolak transfer pria tersebut, meskipun sangkaan terhadap pria itu baru berupa tuduhan. Berita terkait pencari suaka yang dituduh melakukan pelecehan seksual di Nauru tersebut telah dipublikasikan pada 7 November 2019 pada saluran berita Sky news Australia dan news.com.au (Skynews.com.au.,

2019).

Aktor fungsional selanjutnya adalah Senator Pauline Hanson. Kritik yang disampaikan Senator Queensland tersebut terhadap pemberlakuan Undang-Undang Evakuasi Medis memberikan alasan kuat bagi Pemerintah Australia untuk mengeluarkan putusan mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis. Dalam pernyataannya, Pauline Hanson menyatakan keprihatinannya terhadap Partai Buruh dan masyarakat Australia yang telah dibodohi oleh para pengungsi. Selain itu, Pauline Hanson menuluki Undang-Undang Evakuasi medis sebagai ketentuan yang “konyol” dan merupakan keharusan bagi partainya untuk mencabut Undang-Undang tersebut (Worthington, 2019).

Menurut Hanson, Partai Buruh telah membuat kesalahan dalam membiarkan pengungsi masuk ke wilayah Australia. Dari 179 pengungsi yang dipindahkan dibawah akses evakuasi medis, mengapa hanya 19 pengungsi yang dirawat di rumah sakit, dan dari 19 orang tersebut hanya ada 6 yang dirawat segera di rumah sakit, setelah pengungsi tiba di negara Australia. Pauline Hanson menambahkan bahwa Australia telah dibodohi oleh Partai Buruh dan dibodohi oleh cerita kesedihan yang dibuat-buat para pengungsi (Senate Hansard, 2019).

“Aku muak dengan kebohongan yang terjadi. Anda mengatakan orang-orang Nauru adalah sandera. Mereka tidak. Seorang wanita dari Nauru berkata: 'Kalian orang-orang di Australia bodoh. Anda telah membuat kami orang Nauru menjadi orang yang sangat kaya. Mereka menjalani kehidupan. Mereka berbaaur dengan orang-orang kita. Mereka punya bayi. Mereka mendapatkan visa. Mereka bisa keliling dunia. Kalian orang-orang di Australia bodoh, karena kalian telah membuat kami menjadi orang yang sangat kaya.' Itulah tepatnya yang dilakukan Partai Buruh. Anda telah menempatkan orang-orang Australia dalam situasi itu. Saya kecewa terhadapmu Partai Buruh,” tutur Pauline Hanson dalam sidang pencabutan Undang-Undang evakuasi medis di tingkat Senat pada tahap second reading.

Aktor fungsional yang terakhir adalah Senator Jacquei Lambie. Melalui keputusannya berpihak pada kubu pemerintah, Jacquei Lambie telah mendorong keluarnya keputusan untuk mencabut Undang- Undang evakuasi medis. Berpihaknya Lambie pada Pemerintah, membuat sidang pencabutan Undang- Undang Evakuasi Medis akhirnya dimenangkan oleh pemerintah dengan hasil 37 suara berbanding 35 suara. Seperti yang diketahui, bahwa Lambie merupakan pemegang suara penentu dalam voting pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Dirinya menjadi penentu kemenangan pada sidang lanjutandi Senat, setelah

voting yang diadakan di DPR mengalami hasil yang berimbang. Kala itu, Jacquei Lambie memilih untuk abstain dan menunggu sidang lanjutan yang akan dibahas pada tingkat Senat. "Undang-Undang Evakuasi Medis bukanlah ancaman keamanan nasional tetapi ada masalah nyata dengan cara operasinya, pemerintah telah bekerja sama untuk hasil yang diinginkan, yakni di manaperbatasan Australia aman, kapal telah berhenti dan orang sakit tidak sekarat saat menunggu perawatan. Sebagai hasil dari pekerjaan itu, saya lebih dari puas bahwa kondisi sekarang memungkinkan Undang-Undang Evakuasi Medis dicabut," pungkask Lambie dalam sidang pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis di tingkat Senat tahap second reading.

Keberpihakan Lambie terhadap pemerintah disinyalir karena kekhawatirannya terhadap kondisi pengungsi. Menurut Lambie, pemberlakuan Undang-Undang Evakuasi Medis dapat mengundang lebih banyak lagi kedatangan pengungsi internasional dengan menggunakan perahu untuk menuju Australia. Lambie khawatir pengungsi yang berusaha menuju Australia dengan menggunakan perahu tersebut malah terkatung-katung di lautan luas karena adanya operasi penghalauan kapal yang diterapkan imigrasi Australia. Tak jarang, pengungsi yang menuju Australia menggunakan perahu tersebut justru tenggelam, sebeleum dapat mencapai Australia.

Dalam pernyataannya, Lambie mengungkapkan bahwa dirinya ingin memastikan bahwa hal-hal seperti tenggelamnya perahu, tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, dirinya tidak ingin lagi mendengar adanya kabar kematian dari pengungsi yang mencoba mencapai Australia dengan perahu (Martin, 2019).

Database Kematian Perbatasan Australia yang dikelola oleh Border Crossing Observatory, sebuah jaringan penelitian yang berbasis di Monash University mengungkapkan bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 2017 telah menghitung 1.997 kasus kematian di perbatasan. Kasus kematian tersebut termasuk pengungsi internasional yang tewas di laut, pengungsi yang bunuh diri di pusat penahanan Australia dan pengungsi yang meninggal karena sebab alami dalam penahanan (Monash.edu., 2021).

Dari uraian pembahasan ini, dapat dipahami bahwa tindakan pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis merupakan bentuk politisasi dari Pemerintah Australia guna mencabut ketentuan Undang-Undnag Evakuasi Medis secara darurat. Pemerintah Australia sengaja menyajikan kehadiran Undang- Undang Evakuasi Medis sebagai sebuah ancaman

eksistensial agar dapat mengambil keputusan yang dapat melangkahi aturan-aturan. Dengan melabeli isu Undang-Undang Evakuasi Medis sebagai isu keamanan nasional, pemerintah akhirnya memiliki klaim sah untuk mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis. Hal tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Scott Morrison dan Peter Dutton melalui pernyataan yang disampaikan oleh keduanya terhadap publik.

Penggeloraan kata "keamanan" yang dinyatakan oleh Scott Morrison dan Peter Dutton tersebut adalah wujud dari wacana yang dikonstruksikan untuk membenarkan langkah pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Guna melindungi masyarakat Australia sebagai objek terdampak, alasan pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Evakuasi Medis Australia dianggap tidak cukup valid. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kehadiran Undang-Undang Evakuasi Medis yang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keamanan masyarakat Australia hanyalah merupakan masalah yang dibesar-besarkan. Pemerintah dianggap telah mengesampingkan fakta bahwa prosedur yang tertera dalam akses pemindahan pengungsi sudah matang, dimana pemindahan tersebut sudah meliputi penjagaan keamanan yang ketat, sehingga kecil kemungkinan ditemukannya kasus penyelundupan ke Australia.

Selain itu, penelitian ini juga telah menemukan aktor-aktor yang mempengaruhi keluarnya keputusan pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Aktor-aktor tersebut meliputi Media, Pengungsi dan Jacquei Lambie. Tanpa menjadi objek terdampak atau aktor yang meminta keamanan atas nama objek yang terdampak, Media, Pengungsi dan Jacquei Lambie ini adalah aktor yang sangat mempengaruhi keputusan pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis. Aktor-aktor tersebut adalah aktor yang mempengaruhi dinamika pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis yang dilakukan oleh Scott Morrison dan Peter Dutton merupakan sebuah tindak tutur atau speech act. Morrison dan Dutton sengaja menyajikan isu pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis sebagai ancaman eksistensial agar dapat mengambil langkah darurat dengan memungkinkan aksi tanpa aturan politik resmi.

Pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis merupakan bentuk upaya ekstrim dari sebuah tindakan pengamanan. Mencabut Undang-Undang yang belum genap satu tahun menggambarkan bahwa ada langkah politik mendesak yang diambil oleh Pemerintah Australia dengan melampaui aturan-aturan yang ada. Hal tersebut disinyalir sebagai upaya agar dapat mengamankan suatu isu melalui cara-cara yang melampaui aturan resmi, sehingga Undang-Undang Evakuasi Medis yang belum berlaku genap dari satu tahun, bisa untuk dibatalkan ataupun dicabut. Perubahan pada Undang-Undang tersebut disahkan dan disetujui pada 4 Desember 2019, berdasarkan persetujuan kerajaan (Royal Assent), Undang-Undang nomer 110, tahun 2019.

Dengan menggunakan tiga unit analisis keamanan dalam pendekatan speech act, penelitian ini telah menemukan aktor pengamanan, objek terdampak dan aktor fungsional dalam kasus pencabutan Undang-Undang Evakuasi Medis Australia tahun 2019. Adapun aktor-aktor tersebut antara lain Scott Morrison dan Peter Dutton sebagai aktor pengamanan, masyarakat Australia sebagai objek terdampak, kemudian media, Pauline Hanson dan Jacquei Lambie sebagai aktor-aktor fungsional

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 7News Australia. (2019). Medevac legislation repealed, Scott Morrison & Peter Dutton hold mediaconference. [youtube]. Australia: 7News Australia.
- ABS. (2021). Recorded Crime – offenders. Dipetik 9 Mei 2021, dari Australian Bureau of Statistics (ABS) Website: <https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/recorded-crime-offenders/2019-20>.
- Atfield, Yara M. (2021). Medevac detainees have been freed after years in Australia's immigration detentionsystem. Here's why, and what may happen next. Dipetik 8 Mei 2021, dari ABC Australia Website: <https://www.abc.net.au/news/2021-01-21/medevac-detainees-have-been-freed-from-melbourne-hotel/13077296>.
- Buzan, Barry, Ole W. & Jaap D.W. (1998). Security: A New Framework For Analysis. London: Lynne RiennerPublisher.
- Davidson, Helen & Eleanor A.R. (2019). Australia resettled two Rwandans accused of murder in deal with US. Dipetik 6 Agustus 2021, <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/may/16/australia-resettled-two-rwandans-accused-of-in-secret-deal-with-us-reports>.
- Davidson, Helen. (2019). Dutton uses medevac law to refuse transfer despite claiming it could not be done. <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/oct/16/dutton-uses-medevac-law-to-refuse-transfer-despite-claiming-it-could-not-be-done>.
- Davidson, Helen. (2019). Offshore detention: Australia's recent immigration history a 'human rights catastrophe'. <https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/13/offshore-detention-nauru-immigration-history-human-rights>.

- Eriyanto. (2002). Analisis Framing. Yogyakarta : Lkis Printing Cemerlang.
- Hamad, Ibnu. (2007). Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana. Jurnal Mediator. Vol. 8. No.2. Hal. 327.
- Hamid, Zulkifli. (1999). Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal. 70-72.
- Harris, S.Z. (1952). Discourse Analysis (Vol. 28, No. 1, Hal. 30). Pennsylvania: Linguistic Society of America.
- Kamalu, Ikenna & Ayo O. (2015). Discourse analysis dalam Ikenna Kamalu and Isaac Tamunobelema (Ed). Issues in the study of language and literature (Hal. 169). Ibadan: Kraft Books Limited.
- Martin, Sarah. (2019). Labor's new leadership team stays firm in support of medevac law. Dipetik 8 Mei 2021, <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/jun/05/labors-new-leadership-team-stays-firm-in-support-of-medevac-law>.
- Martin, Sarah. (2019). Medevac repeal bill passes after Jacqui Lambie makes 'secret deal' with Coalition. Dipetik 6 Agustus 2021, <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/dec/04/medevac-repeal-bill-passes-after-jacqui-lambie-makes-secret-deal-with-coalition>.
- Monash.edu. (2021). Podcast featuring BOB's Marie Segrave on Australian border deaths and migrant labour exploitation. Dipetik 12 Agustus 2021, <https://www.monash.edu/arts/border-crossing-observatory/news-and-events/articles/2017/podcast-featuring-bobs-marie-segrave-on-australian-border-deaths-and-migrant-labour-exploitation>.
- Murpharoo. (2019). Essential poll: majority of Australians support medevac or better asylum care. <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/sep/17/essential-poll-majority-of-australians-support-medevac-or-better-asylum-care>.
- Parliament of Australia. (2021). Bills and Legislation. Dipetik 10 Maret 2021, [https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Bills\\_LEGislation/Bills\\_Search\\_Results/Result?bId=r6343](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r6343). Parliamentary Joint Committee on Human rights. (2019, 4 Desember). Migration Amendment (Repairing Medical Transfers) Bill 2019. Report 6 of 2019. AUPJCHR 102.
- Pedley, Nick. (2014). Australian authorities turn back 37 Sri Lankan asylum seekers near Indonesian coast. <https://www.abc.net.au/news/2014-11-29/australian-authorities-turn-back-37-sri-lankan-asylum-seekers/5927436>.
- PEO. (2021). How is a law/legislation removed or repealed in Australia and what is the process?. [https://questions.peo.gov.au/questions/how\\_is\\_a\\_law\\_legislation\\_removed\\_or\\_repealed\\_in\\_australia\\_and\\_what\\_is\\_the\\_process/22](https://questions.peo.gov.au/questions/how_is_a_law_legislation_removed_or_repealed_in_australia_and_what_is_the_process/22).
- Refugee Action. (2021). Why are asylum seekers held on Manus and Nauru?. Dipetik 5 Maret 2021,; [https://www.refugeeaction.org.au/?page\\_id=4528](https://www.refugeeaction.org.au/?page_id=4528).
- Remeikis, Amy. (2019). Do Dutton's medevac law claims stack up against court ruling? – explainer. Dipetik 6 Agustus 2021, <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/jun/20/do-duttons-medevac-law-claims-stack-up-against-court-ruling-explainer>.
- Senate Hansard (2019, 4 Desember). Migration Amendment (Repairing Medical Transfers) Bill 2019, Second Reading. 12 Agustus, 2021. <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;db=CHAMBER;id=cha>



- mber%2Fhansards%2Fe334e180-9912-41c7-af31  
5051507e72fa%2F0024;query=Id%3A%22chamber%2Fhansards%2Fe334e180-9912-41c7-af31 5051507e72fa%2F0036%22.
- SkyNews Australia. (2019). 'The boats could start up again' if controversial medevac laws are not repealed. Dipetik 12 Agustus 2021, <https://www.skynews.com.au/australia-news/the-boats-could-start-up-again-if-controversial-medevac-laws-are-not-repealed/video/f77d94cae153f510311d46a887a14c7b>.
- Stayner, Tom. (2019). Jacqui Lambie rejects horse-trading with 'humanity' over vote to repeal medevac laws. Dipetik 13 Agustus 2021, <https://www.sbs.com.au/news/jacqui-lambie-rejects-horse-trading-with-humanity-over-vote-to-repeal-medevac-laws/9a63210b-71cd-4cff-9ff0-746c524693e0>.
- Suwecawangsa, Adi.P. (2017). Kebijakan Australia Mengenai Para Pencari Suaka (Asylum Seekers) Berupa Pacific Solution And Sovereign Borders (OSB). Thesis. Yogyakarta: Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Waever, Ole. (1995). Securitization and Desecuritization dalam Ronnie D. Lipschutz (Ed). On Security (Hal. 6-7). New York: Columbia University Press.
- Walton, Kate. (2019). 'Dark day': Australia repeals medical evacuation for refugees. <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/4/dark-day-australia-repeals-medical-evacuation-for-refugees>.
- Walton, Kate. (2020). Australians fed up with News Corp's climate scepticism. <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/16/australians-fed-up-with-news-corps-climate-scepticism>.
- Worthington, Brett. (2019). Government accused of reaching a secret deal with Jacqui Lambie to end medevac refugee transfers. <https://www.abc.net.au/news/2019-12-04/medevac-jacqui-lambie-coalition-repeal/11745704>.
- Worthington, Brett. (2019). Senators unable to reach an agreement on Government push to repeal medevac laws. <https://www.abc.net.au/news/2019-10-18/senate-committee-split-on-repealing-medevac-laws/11614764?nw=0&r=HtmlFragment>.
- Wroe, David & David C. (2019). Morrison's promise to repeal refugee medical transfer bill faces Senate block. <https://www.smh.com.au/federal-election-2019/morrison-s-promise-to-repeal-refugee-medical-transfer-bill-faces-senate-block-20190520-p51pa2.html>.